

JATI DIRI

Perlu Sikap Baru atas Karya Seni

Sebuah pameran seni rupa untuk Marsinah yang rencananya digelar di Balai Pemuda Surabaya batal diselenggarakan karena tidak mendapat izin kepolisian. Bagi kita peristiwa semacam ini sebenarnya sudah tidak lagi mengejutkan. Pelanggaran terhadap peraturan kesenian tidak hanya sekali ini terjadi. Pelanggaran pameran seni rupa sendiri dalam catatan kita sudah terjadi beberapa kali. Pada tahun 1977, pameran seni rupa berjudul "Kepribadian Apa" di Yogyakarta, dilarang aparat keamanan. Di tahun yang sama, pameran karya Hardy yang berjudul "Seni Rupa Baru Menggambar Presiden 2000" juga tak boleh berlangsung.

Pada umumnya, larangan penyelenggaraan sebuah forum ekspresi seni — dalam bentuk pameran, pameran, dan atau pertunjukan — dilakukan oleh aparat dengan pertimbangan-pertimbangan keamanan. Sebuah pertunjukan tertentu diasumsikan bisa memicu keresahan masyarakat dan benuara pada terganggunya normalitas masyarakat sosial. Dan menjaga normalitas ini memang menjadi wewenang pihak yang memang diberi kewenangan memelihara situasi aman.

Dalam konteks ini, asumsi yang menjadi landasan aparat untuk melarang berlangsungnya sebuah forum ekspresi seni tersebut mungkin ada benarnya. Masalahnya, apakah sebuah karya seni maupun forum kesenian bisa mendorong munculnya tindakan-tindakan yang bisa mengarah pada situasi abnormalitas? Apakah forum tersebut potensial untuk melahirkan sebuah "kefatuhan" politik.

Masalah ini yang masih menjadi perdebatan panjang. Sebagian besar mengatakan bahwa seni tidak mungkin bisa mendorong orang untuk memberontak atau membuat kerusuhan. Antara jagat seni dan jagat non-kesenian amat berbeda. Ini karena jagat seni berhubungan dengan dunia perasaan, bagian terhalus dari manusia. Kesenian lebih berhubungan dengan nurani kelingka yang lain. Karenanya, tidak mungkin sesuatu yang halus itu menghasilkan kekerasan.

Kalaupun kemudian forum ekspresi seni menghasilkan sebuah kerusuhan, menurut pendapat sebagian orang, itu bukan seni itu sendiri yang menjadi penyebabnya. Tetapi sifat massal yang diwujudkan oleh forum tersebut. Sebuah pertunjukan musik rock, misalnya. Musik rock itu sendiri tidak bisa memicu orang untuk

berbuat kekerasan. Tapi sifat publik musik rock yang cenderung massal itulah yang menjadi penyebabnya.

Dalam perspektif psikologi massa, kumpulan manusia yang sifatnya anonim memang sangat mudah dipancing untuk membuat sebuah kerusuhan. Apalagi massa itu adalah kumpulan dari sekelompok umat manusia yang secara struktural telah mengalami represi, baik itu bersifat represi politik, ekonomi, maupun sosial. Massa yang demikian akan cenderung melodak, begitu ada diantara mereka yang memancingnya.

Tapi mana diantara dua pendapat tersebut yang benar? Kita tidak ingin mempersoalkan lebih jauh pendapat tersebut. Hanya saja, kita perlu bertanya apakah masih perlu kita menggunakan pendekatan keamanan dalam mensikapi berbagai peristiwa kesenian. Apakah belum perlu kita mulai memberi peluang yang lebih besar bagi munculnya kreatifitas-kreatifitas kesenian secara lebih leluasa?

Ketika kita mulai menganggarkan isu keterbukaan, ketika perhatian internasional terhadap demokrasi semakin mengental, dan ketika kita sendiri ingin bisa bersaing dalam arus peredaran kebudayaan internasional, peluang yang lebih luas terhadap munculnya kreatifitas seni tampaknya tak bisa ditawar lagi. Disamping peluang yang lebih leluasa itu bisa memicu lahirnya karya-karya seni baru, pemberian keluasaan terhadap kelompok seniman itu sendiri sudah memiliki nilai lebihnya.

Dalam kaitan ini, upaya memukulkan secara lebih luas pendekatan keamanan dalam menangani peristiwa kesenian merupakan langkah yang paling bijak. Tujuannya, tidak hanya memberikan kebebasan terhadap lahirnya sebuah karya-karya seni yang monumental, tetapi lebih dari itu. Bahwa kita perlu mengembangkan kebudayaan besar yang mampu bersaing dalam peredaran dunia, merupakan tanggungjawab kita bersama.

Padahal, struktur lahirnya kebudayaan besar seperti itu, dibutuhkan sebuah struktur sosial, politik, dan kebudayaan yang lebih leluasa. Adalah nalf kalau kita mengharap lahirnya karya-karya seni dan kebudayaan yang mampu bersaing secara internasional, sementara kita masih menggunakan pendekatan keamanan dalam mensikapi peristiwa kesenian.

Mungkin kita memang sudah sahnya untuk berpikir ulang tentang kebijakan makro kita mengenai pembangunan kesenian kita.

Kapolda soal Pamer Lukis untuk Marsinah

Surabaya, JP.

Kapolda Jatum Mayjen Pol Drs Esono Rivin Arjuna menegaskan, ada dua alasan yang melandasi pembatalan pameran seni rupa untuk Marsinah di Dewan Kesenian Surabaya (DKS) Kamis malam lalu. "Yang pertama karena belum ada izin, dan yang kedua karena kita tidak melihat ada manfaatnya penyelenggaraan kegiatan seperti itu," katanya ketika ditemui wartawan di lokasi penyelenggaraan Surabaya Expo '93 kemarin.

Jenurut Rivin, kegiatan pameran seperti yang hendak diselenggarakan DKS itu sama sekali tidak ada unsur manfaatnya. "Malah bisa-bisa menimbulkan masalah baru, yakni timbulnya polemik mengenai kasus Marsinah ini," katanya.

Yang pasti, jika pameran itu tidak dilarang, menurut dia, dikawatirkan akan dapat menimbulkan *public opinion* yang tidak betul mengenai daduk perkara kasus Marsinah. (pam)